

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Politeknik Pariwisata Makassar atau Poltekpar Makassar adalah perguruan tinggi kedinasan yang berada dalam naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Poltekpar Makassar telah mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional dan menjadi pusat wisata bahari di Indonesia. Politeknik Pariwisata Makassar atau Poltekpar Makassar adalah perguruan tinggi kedinasan yang berada dalam naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Poltekpar Makassar telah mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional dan menjadi pusat wisata bahari di Indonesia.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut

1. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata alam laut (TWAL) Kapoposang belum sepenuhnya terlibat hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus salah satunya pada saat pemetaan zonasi hanya kelompok masyarakat yang ikut bergabung dalam sosialisasi tetapi pada saat penandaan zonasi Pulau Kapoposang masyarakat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan tentang keberadaan zona inti yang akhirnya pengetahuan masyarakat tentang zona inti tidak ada. Hal ini merupakan Partisipasi Manipulasi yang dimana dalam sosialisasi hanya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang telah diketahui akan setuju dengan program yang akan disosialisasikan

2. Pada pengembangan TWAL Kapoposang kunjungan wisata membawa berbagai dampak sosial budaya terhadap masyarakat lokal, baik positif maupun negative. Adapun dampak positif antara lain ; Peningkatan kesadaran budaya, interaksi budaya dan peningkatan pendapatan Masyarakat local. Sedangkan dampak negatifnya antara lain; Terjadi komersialisasi budaya, perubahan nilai social dan ketimpangan social.
3. Dalam rangka pengembangan objek wisata bahari, pemberdayaan masyarakat lokal menjadikan prioritas utama untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat lokal untuk berusaha dan terlibat langsung didalamnya. Untuk itu dilakukan beberapa empat strategi yaitu: Pemetaan Potensi dan Sumber Daya, Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Pengembangan Infrastruktur, dan Promosi dan Pemasaran

5.2 Saran

1. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Lokal Secara Inklusif: Untuk menghindari partisipasi yang manipulatif, disarankan agar semua lapisan masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pemetaan dan penandaan zonasi di TWAL Kapoposang. Pemerintah dan pihak pengelola sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih transparan dan partisipatif, dengan memberikan informasi yang memadai kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang keberadaan dan pentingnya zona inti.

Pelatihan dan sosialisasi yang lebih inklusif dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat lokal.

2. **Pengelolaan Dampak Sosial Budaya Pariwisata:** Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari kunjungan wisata, disarankan untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara pelestarian budaya dan komersialisasi. Kegiatan pariwisata harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat identitas budaya lokal dan tidak merusak nilai-nilai sosial yang ada. Pemerintah dan pengelola wisata dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk merancang program-program yang mendukung pelestarian budaya dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
3. **Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Dalam rangka mengembangkan potensi wisata bahari di Kapoposang, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan dukungan dalam bidang kewirausahaan. Masyarakat lokal perlu didorong untuk lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi yang terkait dengan pariwisata, seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan produksi kerajinan tangan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Kolaborasi Antar Stakeholder: Pengembangan TWAL Kapoposang memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, dan LSM. Disarankan agar mekanisme kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan diterapkan, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan perannya. Peningkatan dialog dan komunikasi antar-stakeholder dapat membantu menyelesaikan konflik, meningkatkan kesepahaman, dan memperkuat komitmen bersama dalam melestarikan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.